

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Watumalang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan Wadaslintang, dan Kecamatan Sukoharjo

a. Program dan Kegiatan

Alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 berjumlah total **Rp 6.263.894.683,-** dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar **Rp 5.527.555.983,-** atau mencapai 88.24%. Belanja urusan komunikasi dan informatika bisa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.C.10.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	3.962.677.107	3.836.822.458
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.863.375	397.525.953
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457.793.000	402.484.935
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.372.900.000	1.344.254.701
4.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	218.000.000	213.106.500
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	1.245.120.732	1.231.870.369
6.	Program kerjasama informasi dengan media massa	250.000.000	247.580.000
B	Belanja Tidak langsung	2.301.217.576	1.690.733.525
1	Belanja Pegawai	2.301.217.576	1.690.733.525
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	6.263.894.683	5.527.555.983

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017(diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan utama pada program ini antara lain adalah Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Daerah dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat, pembuatan spanduk, pembuatan booklet Profil Umum Daerah sebagai sarana mengenalkan secara luas Kabupaten Wonosobo. Selain melalui penyebaran booklet

dan media luar ruang, media internet yakni pembuatan dan updating informasi Website diskominfo.wonosobokab.go.id.

Kegiatan lainnya adalah Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM, hal ini didasari Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Perda Kabupaten Wonosobo no 16 Tahun 2007 tentang LPPL Radio Pesona FM. Diharapkan dengan berfungsinya LPPL Radio Pesona FM, pertukaran informasi dan komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat serta edukasi dan hiburan publik terhadap masyarakat dapat terselenggara secara lebih luas. Pada lapisan masyarakat tertentu media ini masih dibutuhkan dan kedepan perlu ditingkatkan menjadi media yang menjangkau ke berbagai daerah dengan memanfaatkan jalur internet yaitu *radio streaming* dan Website Radio Pesona yang telah dibangun.

Kegiatan Gelar Informasi daerah dan Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kegiatan ini melibatkan PPID dari 39 OPD. Kegiatan ini bermanfaat untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang no. 14 Tahun 2018 dan mempermudah publik untuk mengakses informasi dengan meningkatkan kapasitas PPID penguatan proses penyebaran/ pengelolaan informasi dan dokumentasi. Peluang pengembangan sarana penyebaran informasi adalah melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai penerima informasi sekaligus menjadi penyebar informasi. Dalam hal ini pemerintah daerah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yakni suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peluang lainnya yang pada tahun 2017 mencoba untuk dimanfaatkan dalam rangka penyebaran informasi menggunakan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), forum ini memanfaatkan kebudayaan setempat sebagai media penyebaran informasi, sebagai contoh pentas ketoprak, lengger, wayang, guyon maton dan media tradisional lainnya.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunikasi dan mengurangi daerah dengan tanpa sinyal pada tahun 2017 dilakukan Audit Cell Plan dengan tujuan perizinan pendirian tower sesuai dengan dokumen cell plan dan Rencana Tata Ruang Wilayah, hasil akhir dari kegiatan ini adalah Review Cell Plan dimana pada Dokumen sebelumnya terdapat hambatan untuk memenuhi cakupan sinyal telekomunikasi, sebagai akibat dari sistem grid yang diterapkan. Pada review ini sistem yang digunakan memungkinkan untuk menjangkau seluruh wilayah.

2) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan pada program ini lebih pada sosialisasi dan pelatihan di kecamatan untuk Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Aplikasi Perizinan (APRIZ), kedua aplikasi ini bermanfaat untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

Seiring perkembangan teknologi informasi maka kebutuhan akan sarana dan prasarana baik software, hardware dan brainware sudah menjadi tuntutan, keberadaan data center yang menjadi pusat dimana ketiga unsur tadi ditempatkan membutuhkan pemeliharaan juga penambahan hardware, hal ini untuk mendorong penerapan e-government Wonosobo. Penyediaan bandwidth untuk Data Center (DC)

yang menopang aplikasi dan jaringan internet/intranet Pemkab. Kegiatan ini sebagian besar berwujud pengadaan sarpras, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan PT Telkom Indonesia, PT. Bhinneka Mentari Dimensi.

Kegiatan lain dari program ini yaitu Integrasi Software Core Sistem Pemerintahan Daerah, kegiatan ini sebagai awalan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang bertebaran di OPD dengan semangat '*Satu Data Satu Entri*' ini menjadi penting untuk menyederhanakan proses dan memudahkan operator, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia di tiap-tiap OPD.

4) Program kerjasama informasi dengan mas media

Program ini mencakup kegiatan kerjasama diseminasi informasi dengan media Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos Radar Semarang, Wonosobo Ekspres, dan Tabloid Cempaka serta kegiatan Komunikasi pada event pemerintah dan masyarakat.

c. Capaian Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi Pemerintah maka harus dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang disusun. Pengukuran kinerja tersebut berupa capaian kinerja yang di-breakdown dari indikator EKPPD tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel III.C.10.2
Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2016	2017
1	Website milik pemerintah daerah	ada	ada
2	Pameran/expo	10	19

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Website yang dikelola Pemerintahan Kab Wonosobo, dari 22 di tahun 2016 menjadi 37 di tahun 2017, diantaranya yaitu:

- Lapor Bupati, Dashboard Eksekutif
- Monitoring Operasional Setda (MOS)
- Simkeudes, APBDes (Open Data Desa)
- e-BPHTB
- PATEN (Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan)
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
- Aplikasi Cell Plan
- e-Presensi
- Retribusi Daerah
- SIGA (aplikasi Gender dan Anak)
- SIPP/e-Planning (Aplikasi Perencanaan)
- SINTA NADINE (Aplikasi Naskah Dinas Elektronik)

III.C.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- SISNAKER (aplikasi Ketenagakerjaan)
- APRIZ (Aplikasi Perizinan)
- Sistem Informasi Kesejahteraan Keluarga
- SIMPUS (Puskesmas)
- SIK (Rumah Sakit)
- SIMDA (Keuangan Daerah)
- SIMPEG (Kepegawaian)
- SIAK (Kependudukan)
- Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

Peningkatan interjadi selain karena penambahan besaran bandwidth di *data center* dan pemeliharaan jaringan WAN, juga karena ada fasilitasi dan dukungan dari sektor/urusan pemerintahan untuk mengembangkan aplikasi yang relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Maraknya penggunaan perangkat smartphone menjadi peluang tersendiri untuk memudahkan penyebaran informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa aplikasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- Wonosobo Smart
- Wonosobo News
- Satu Data Wonosobo
- One Touch Statistik
- RSUD Wonosobo

Tabel III.C.10.3
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase Sistem Informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan Blueprint TIK	44%	45%	77%	171%	○
2	Prosentase SKPD Yang menerapkan 3-government	DTD	42%	100%	238%	○
3	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	14%	100%	100%	100%	○
4	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	25%	40%	60.50%	151%	○

III.C.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
5	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	24%	75%	78.05%	104%	○
6	Persentase PD yang memutakhirkan informasi wajib setiap saat	24%	75%	78.05%	104%	○

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Keterangan Status Capaian :

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 100%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Kenaikan capaian ini sebagai imbas maraknya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis pemerintahan yang memudahkan dan mendekatkan pelayanan didukung pula oleh penerima manfaat itu sendiri yaitu masyarakat luas, dimana teknologi sekarang berkembang pesat dan murah.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.C.10.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	8
	b. S-1	4
	c. DI - DIV	4
	d. SMA	6
	e. SMP	-
	f. SD	-
	Jumlah	22
2	Golongan	

III.C.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

	a. Golongan IV	-
	b. Golongan III	5
	c. Golongan II	11
	d. Golongan I	6
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	22
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	0
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	14
	Jumlah	22

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.C.10.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	3.708.867.230,00
1	Tanah	385.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.797.559.430,00
	Alat-alat Besar	129.612.800,00
	Alat-alat Angkutan	473.770.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.400.000,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.241.247.220,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	940.529.410,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
3	Gedung dan Bangunan	508.707.800,00
	Bangunan Gedung	508.707.800,00
	Monumen	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.600.000,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	17.600.000,00
	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD, 2018

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang muncul pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- Tingkat pemahaman masyarakat (literasi) dan budaya teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan birokrasi masih perlu ditingkatkan. Ini mempengaruhi kecepatan adaptasi berbagai produk pendayagunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Jangkauan akses internet di kecamatan, mengingat kedepan kebutuhan akses internet untuk melayani aplikasi menjadi hal yang utama. Faktor topografis dan geografis Wonosobo menyebabkan Jaringan WAN (Wide Area Network) Kabupaten Wonosobo belum dapat mencapai seluruh kecamatan.
- Aplikasi-aplikasi yang digunakan masih belum terintegrasi yang mengakibatkan belum efektifnya proses bisnis di berbagai OPD
- Belum optimalnya website milik pemerintah dalam hal ini Portal Pemkab wonosobokab.go.id dan website OPD yang ternyata menjadi salah satu indikator penilaian kinerja layanan informasi publik di tingkat Provinsi.
- Belum optimalnya kelembagaan PPID di tingkat OPD yang sangat mempengaruhi kinerja layanan informasi publik di tingkat OPD sebagai PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- Mencoba menggagas lagi penggunaan tower dalam jaringan cell-plan agar bisa dimanfaatkan oleh Pemkab dalam pendayagunaan TIK khususnya jaringan WAN antar kecamatan
- Mendorong intervensi kelembagaan dan ketatalaksanaan agar bisnis proses birokrasi beralih ke sebanyak mungkin instrumen berbasis TIK. Selain lebih efisien, ini juga selaras dengan perkembangan jaman dan arahan dari Pusat tentang otomasi dan efisiensi proses birokrasi.
- Mencari alternatif pengganti teknologi WAN khusus pada kecamatan dengan akses jaringan internet yang kurang memadai

III.C.10. **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

- Di tahun 2017 mulai mengintegrasikan aplikasi yang dipakai, dimulai dari aplikasi yang paling banyak dipakai yaitu aplikasi keuangan/SIMDA dengan aplikasi perencanaan/e-Planning.
- Mengembangkan sarana prasarana penyebaran informasi non fisik dalam hal ini Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)
- Melakukan pelatihan dan fasilitasi pembuatan website OPD dengan subdomain wonosobokab.go.id sampai pada website desa.
- Upaya pembinaan kepada PPID OPD atau PPID Pembantu dalam mengemas dan mengklasifikasikan jenis informasi dalam bentuk daftar informasi publik yang harus disediakan oleh setiap OPD.